

**ANALISIS PENENTUAN SEKTOR EKONOMI STRATEGIS  
DALAM UPAYA MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
DI PROPINSI LAMPUNG**

**Oleh:**  
**Syamsurijal**  
**Suhel**  
**Nuke Dina Apriyanti**

**ABSTRACT**

*The aims of this research are to know and to analyze of result from Sectors economy Strategic in effort to support implementing of local autonomy on Lampung Province. Theoretical framework based on Lincoln arsyad (1998); HF. Wiliamson (2000); Handoyo Pamudji (1988); Kenneth Davey (2000). The unit of analyzes method is quantitative approaches with uses location Quotients Analyzes (LQ), Contribution of best sectors and Effort tax for seeing of taken government prospect as ono as component who part in implementing of local autonomy.*

*Result of the test indicates that from potent who lampung potent to have with use LQ analyzes with nine sectors economy can conclude that basis economy and have potent who can be value for economy of Lampung for 1993 – 2002 are agriculture sector, cattle raising sector, and forestry sector (2.158), construction sector (1.225), Transportation sector (1.108) and service sector (1.024). So from all basis sectors with PDRB, LQ value bigger than one ( $LQ > 1$ ). Contribution of basis sector with average 61.44 is bigger than non basis sectors with average 38.5878. So that include that for all from tax effort can to know that element of income region who given big contribution is from tax region so that PDRB one region to increase so ability region to pay tax from indirect can support implementing of local autonomy Lampung province.*

*Keywords : Sector Economy Strategic, Basis Economy, Tax Effort, and Local Autonomy*

**PENDAHULUAN**

Secara nasional, saat ini masih dalam tahun transisi bagi pemuliharaan ekonomi nasional yang dilakukan melalui penyehatan perbankan dan mendorong bangkitnya sector rill, pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta memantapkan peran dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat. Dalam waktu yang bersamaan juga terjadi masa transisi

yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke sistem desentralistik berdasarkan undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah.

Sesuai dengan undang – undang nomor 22 tahun 1999 dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, maka daerah diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan terhadap masyarakat.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan nyata, dan bertanggung jawab, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah, selanjutnya pengembangan potensi daerah menjadi tanggung jawab masing – masing daerah dan penggalian sumber – sumber keuangan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

Secara makro perekonomian suatu wilayah menurut lapangan usaha terdiri dari tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder mencakup industri pengolahan, listrik, air bersih serta bangunan, sedangkan sektor tersier mencakup sektor –sektor diluar sektor – sektor di atas.

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Propinsi Lampung  
Tahun 1998- 2002 (Persen)**

<b>Sektor / Lapangan usaha</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001<sup>*)</sup></b>	<b>2002<sup>**)</sup></b>
1. Pertanian	4.23	8.73	0.35	3.40	0.15
2. Pertambangan dan Penggalian	-38.85	-1.89	9.40	3.20	50.56
3. Industri pengolahan	-3.06	-12.33	2.45	3.49	2.35
4. Listrik, gas, dan Air bersih	7.11	17.77	14.49	14.61	6.04
5. Konstruksi	-37.44	-4.76	9.42	5.30	4.14
6. Perdag, hotel, dan restoran	-4.95	3.68	1.66	1.38	5.17
7. Trans dan komunikasi	-4.87	4.41	18.02	3.52	5.98
8. Keu, persewaan dan jasa perusahaan	-28.03	-14.15	-0.06	1.76	28.73
9. Jasa – jasa	-7.60	0.65	2.15	5.59	3.62
<b>PDRB</b>	<b>-7.74</b>	<b>6.12</b>	<b>6.74</b>	<b>7.26</b>	<b>9.12</b>

Sumber : Kantor Pusat Statistik Propinsi Lampung 2004

KET : <sup>\*)</sup> Angka diperbaiki

<sup>\*\*)</sup> Angka sementara

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung pada tahun 1998 merupakan pertumbuhan minus yaitu sebesar –7.74 persen. Bila dibandingkan tahun – tahun selanjutnya yang mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi tahun 1998 mencapai titik terendah sepanjang lima tahun terakhir yaitu pada tahun 1999 sebesar 6.12 persen, pada tahun 2000 sebesar 6.74 persen, pada tahun 2001 sebesar 7.26 persen, sedangkan

pada tahun 2002 ekonomi Lampung sebesar 9.12 persen. Hal ini menunjukkan adanya tanda – tanda pemulihan pada kondisi perekonomian Lampung. Pemulihan kondisi perekonomian ini ditunjang oleh kenyataan bahwa semua lapangan usaha atau sektor telah mengalami pertumbuhan yang positif. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan perubahan performa perekonomian wilayah. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi diharapkan produktifitas dan pendapatan masyarakat akan meningkat melalui penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Tujuan, arah, dan sasaran pembangunan Daerah Lampung ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya melalui tercukupinya berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Melalui penentuan sektor – sektor ekonomi ekonomi yang ada menjadi sektor ekonomi strategis atau berpotensi untuk dikembangkan, diharapkan dapat memberikan arah pembangunan yang lebih menguntungkan atau efisien.

Propinsi Lampung sebagai daerah yang cukup potensial untuk berkembang sangat mengharapkan tercapainya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, oleh karena itu pemerintah daerah berpacu dan berusaha menggali dan menata sumber – sumber pendapatan yang ada secara intensif yang diharapkan mampu memperbesar porsi PAD (Pendapatan Asli Daerah ) terhadap BRD ( belanja Rutin Daerah ) sehingga susidi dan bantuan pemerintah semakin berkurang.

Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan yaitu: Sektor-sektor ekonomi mana saja yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Propinsi Lampung?, Bagaimanakah kontribusi sektor ekonomi strategis terhadap total PDRB Propinsi Lampung?, Bagaimanakah keterkaitan antara kemampuan ekonomi dalam hal ini PDRB dengan kemampuan keuangan yang tercermin dalam penerimaan daerah?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin menganalisis sektor – sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi propinsi Lampung, kontribusi sektor ekonomi strtegis tersebut terhadap total PDRB di Propinsi Lampung, dan keterkaitan antara kemampuan ekonomi dalam hal ini PDRB dengan kemampuan keuangan yang tercermin dalam penerimaan daerah.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk melihat keterkaitan antara kemampuan ekonomi dalam hal ini PDRB dengan kemampuan keuangan yang meliputi komponen penerimaan daerah ini dapat diketahui dengan berapa besar upaya pajaknya ( Tax Effort), yaitu rasio antara penerimaan pajak dengan kemampuan membayar pajak pun semakin tinggi, hal ini menggambarkan keberhasilan suatu daerah.

Teori basis Ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan Industri – industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creations).Richardson mengembangkan suatu

model ekonomi regional yaitu basis ekonomi. Model ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah, dalam model ini kegiatan ekonomi suatu daerah dapat dibedakan menjadi dua sektor yaitu sektor basis (yaitu sektor yang melayani pasar di dalam daerah itu sendiri atau diluar daerah).dan sektor non basis (yaitu sektor yang hanya mampu melayani pasar daerah itu sendiri). Teori basis ekonomi ini biasa disebut analisis basis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pendapatan basis, selanjutnya pendapatan regional akan langsung mengalami kenaikan bila sektor basis mengalami perluasan, sedangkan kenaikan kesempatan kerja baru terasa dalam jangka panjang.(Yudithia, 2000: 18)

Fungsi sektor basis ialah sebagai sektor yang menguntungkan jika dikembangkan dalam kegiatan ekonomi atau bisa juga disebut sebagai sektor pengekspor yang dalam artian ialah sektor tersebut melayani pemasaran barang dan jasa produksi ke luar batas perekonomian wilayah lokal, dan sebaliknya sektor non basis kurang menguntungkan jika dikembangkan atau bersifat lokal yaitu hanya dapat melayani pasar di daerah tersebut. Sesuai dengan sifat sektor basis dapat menimbulkan dan menentukan pertumbuhan wilayah sedangkan sektor non basis hanyalah merupakan akibat dari pertumbuhan wilayah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam menentukan sektor ekonomi dengan melihat kecenderungan koefisien LQ yang dimiliki oleh sektor ekonomi dengan besar lebih dari 1 (satu) dimana besarnya koefisien tersebut dibandingkan oleh tahun awal sampai dengan tahun akhir analisis, dengan kata lain jika penduduk suatu daerah dapat memenuhi kebutuhannya akan suatu barang dengan hasil industri atau kegiatan ekonominya sendiri, maka berarti peranan relatif dari kegiatan ekonomi (industri) yang bersangkutan dalam daerah yang sama dengan peranan relatif dari kegiatan ekonomi (industri) yang bersangkutan dalam daerah adalah sama dengan peranan relatif industri sejenis dalam perekonomian nasional dan itu berarti LQ daerah tersebut adalah 1 (satu), selanjutnya jika LQ lebih besar dari 1(satu) berarti kegiatan ekonomi atau industri di daerah tersebut menguntungkan sehingga dapat mengekspor ke daerah lain.(Yudithi, 2000: 20)

Location Quotient (LQ), yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (sektor) dalam suatu daerah dengan cara menbandingkan peranannya dalam perekonomian daerah kabupaten itu dengan peranan kegiatan atau sektor sejenis dalam perekonomian regional atau sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. (Fachrizar Bachri, 2003 :14 )

Formulanya (*Lincoln Arsyad, 1998 : 316-317*)

$$LQ: \frac{v_i / v_t}{V_i / V_t}$$

Keterangan    LQ        : Locations Quotien  
                   $v_i$         : Nilai tambah dari suatu sektor di suatu daerah  
                   $v_t$         : Nilai tambah total daerah tersebut

$V_i$  : Nilai tambah dari sektor sejenis secara regional / propinsi  
 $V_t$  : Nilai tambah regional / propinsi

Metode LQ dapat memperhitungkan ekspor secara langsung dan tidak langsung, serta dapat diterapkan kepada data historik untuk mengetahui trend (Richardson dalam Yudhitia, 2000 :20 ).

Untuk mengetahui kontribusi sektor ekonomi strategis terhadap penerimaan daerah Propinsi Lampung dapat dicari dengan : (Widodo Susetyo.1989 :21)

$$KS = \frac{TP\ SES}{TPDRB} \times 100 \%$$

Keterangan :

KS = Kontribusi Sektor Ekonomi Strategis  
TP SES = Total Penerimaan tiap Sektor Ekonomi Strategis  
TPDRB = Total PDRB Propinsi Lampung

Untuk melihat prospek penerimaan pemerintah sebagai salah satu komponen yang berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat menggunakan konsep elastisitas yaitu menumbuhkan tingkat kepekaan pajak yang potensial serta elastisitas yang merupakan penggalan potensi pajak. (Kenneth Davey dalam Yudithia, 2000 :70 )

$$\text{Tax Effort} = \frac{\text{Penerimaan Daerah}}{\text{Kapasitas pajak (PDRB)}} \times 100 \%$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis Potensi sektor ekonomi strategis dalam hal ini ekonomi basis di Propinsi Lampung dapat ditelaah melalui perhitungan Location Quotient (LQ). Teknik ini membantu kita untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah suatu sektor. Pada umumnya cara ini digunakan untuk meliputi sektoral dari suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya atau dengan keadaan tingkat nasional.

Konsep LQ mengatakan bahwa bila LQ lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ), maka sektor tersebut memiliki kemampuan ekspor kewilayah lain atau merupakan sektor ekonomi strategis yang dapat dijadikan andalan / tumpuan perkembangan kegiatan ekonomi, sebaliknya bila nilai LQ lebih kecil dari satu ( $LQ < 1$ ), maka sektortersebut cenderung mengimpor dari wilayah lain maupun hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dan umumnya disebut sektor ekonomi non strategis atau sektor non basis.

Hasil perhitungan besaran nilai LQ di Propinsi Lampung memberikan gambaran bahwa pada tahun 1993 hingga tahun 2002 terdapat 4 (empat) sektor ekonomi strategis (sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan ; sektor konstruksi ; sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran ; dan sektor Jasa – jasa)

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa Propinsi Lampung merupakan daerah yang unggul dalam sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi, sektor Transportasi dan komunikasi, dan sektor jasa – jasa. Jika pada awal obsevasi pada tahun 1993 kontribusi sektor basis ini telah mencapai sekitar 62.5 persen pada tahun 2000 sebesar 62,1, maka pada tahun 2002 menjadi 60,6 persen dari total PDRB Propinsi Lampung, tentang perubahan nilai tambah serta kontribusi sektor basis terhadap PDRB Propinsi Lampung.

**Tabel 2. Hasil perhitungan LQ Sektor Ekonomi Propinsi Lampung periode 1993 – 2002 Atas Dasar Harga Konstan 1993**

No	Sektor Ekonomi	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	2.06	2.06	2.21	2.24	2.10	2.09	2.20	2.20	2.24	2.18
2	Pertambangan & Penggalian	0.15	0.20	0.21	0.23	0.25	0.15	0.24	0.25	0.26	0.37
3	Industri Pengolahan	0.64	0.63	0.60	0.59	0.61	0.63	0.53	0.52	0.52	0.50
4	Istrik, gas & air bersih	0.48	0.47	0.48	0.50	0.57	0.56	0.60	0.64	0.68	0.67
5	Konstruksi	0.98	1.17	1.24	1.31	1.35	1.25	1.19	1.26	1.27	1.25
6	Perdagangan, hotel & Restoran	0.94	0.93	0.90	0.92	0.95	1.04	0.99	0.96	0.92	0.92
7	Transportasi & komunikasi	1.06	1.05	1.00	1.03	1.07	0.96	1.16	1.27	1.26	1.22
8	Keuangan	0.63	0.66	0.65	0.65	0.72	0.49	0.68	0.77	0.76	0.91
9	Jasa-jasa	1.14	1.13	1.10	1.09	1.07	0.93	0.92	0.93	0.96	0.96

Sumber: Diolah

Selanjutnya dengan mengetahui besarnya kontribusi sektor ekonomi strategis Pemerintah Daerah Lampung perlu mengkoordinasikan dan mengoptimalkan sektor ekonomiyang berpotensi untuk dipacu oleh masing – masing daerah kabupaten / kota. Melalui mekanisme ini diharapkan lampung mampu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonominya, setelah itu Pemerintah Daerah perlu mensosialisasikan programnya baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat agar memungkinkan program terlaksana secara efektif dan efisien sehingga kemandirian daerah pun terwujud.

Agar proses pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlangsung, maka kondisi kemampuan sektor ekonomi basis perlu terus dipertahankan hingga dapat meraih perluasan pasar. Bila kondisi kemampuan sektor basis tidak dapat dipertahankan diperkirakan akan terjadi pergeseran sumber daya dari sektor basis ke sektor lokal kecuali bila persediaan tenaga kerja dan modal untuk sektor basis adalah tinggi elastisitasnya.

Pada awal obsevasi yaitu pada tahun 1993 sektor ekonomi non basis memberikan kontribusi sebesar 37.5 persen, kemudian pada tahun 1998 sebesar 37.9 persen dan pada tahun 2002 sebesar 39.4 persen. Dengan melihat data tersebut, dimana rata – rata kontribusi sektor ekonomi non strategis pada periode 1993 –2003 sebesar 38,56 kita dapat

lebih memahami bahwa Sektor ekonomi non basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu melayani kebutuhan daerahnya sendiri, dimana sektor ini kurang memberikan kontribusinya terhadap Total PDRB Propinsi Lampung.

Kemampuan daerah untuk membiayai urusan – urusan rumah tangganya, tergantung dari produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, artinya semakin tinggi produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh daerah, artinya semakin tinggi produksi barang dan jasa yang maka semakin besar potensi penerimaan daerah yang dapat diterima pemerintah daerah Elastisitas menggambarkan rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas pajak atau kemampuan membayar pajak dalam hal ini PDRB, ini sama halnya dengan upaya pajak (tax effort).

**Tabel 3. Perkembangan Upaya Pajak Penerimaan Daerah Dari Sektor Basis Di Propinsi Lampung 1993 – 2002 (dalam ribu rupiah)**

Tahun	Total Penerimaan Daerah	PDRB	Upaya Pajak
1993	90.601.350.900	5.410.530.000	1.67
1994	41.259.891.340	5.796.541.000	0.71
1995	63.587.500.580	6.404.819.000	0.99
1996	75.836.158.070	6.914.211.000	1.10
1997	52.055.102.300	7.201.338.000	0.72
1998	63.930.245.170	6.644.128.000	0.96
1999	66.547.033.600	6.938.425.000	0.96
2000	88.305.110.700	7.174.254.000	1.23
2001	144.147.479.600	7.433.265.000.000	1.94
2002	23.559.684.300	7.816.357.000.000	3.01
Rata -rata			1.33

Sumber : Dipenda Propinsi Lampung, 2004 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata – rata upaya pajak untuk jumlah penerimaan daerah yang berhasil dihimpun selama tahun 1993 – 2002 adalah sebesar 1.33 persen artinya terdapat kenaikan dalam kemampuan membayar pajak (PDRB) sebesar satu persen akan menaikkan penerimaan daerah sebesar 1.33 persen, artinya proporsi kenaikan penerimaan daerah adalah lebih besar dari kenaikan kemampuan membayar pajak.

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa PDRB mempunyai keterkaitan terhadap pembentukan penerimaan daerah, yaitu dengan melihat kemampuan dalam mengimpon dana melalui upaya pajak, secara keseluruhan rata – ratanya sebesar 1.33 persen selama periode 1993 –2002, dimana komponen penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah pada pos pajak yaitu sebesar 1.004 persen dan pos bagi hasil pajak/non pajak sebesar 0.24 persen, sehingga pada saat PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak pun semakin tinggi, jadi keberhasilan daerah melalui upaya pajak dari sektor ekonomi strategis meskipun masih terus ditingkatkan secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Lampung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari uraian informasi data serta hasil analisis LQ (location Quotien) pada sektor – sektor ekonomi di Propinsi Lampung maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Berdasarkan potensi yang dimiliki Propinsi Lampung, dengan menggunakan analisis LQ terhadap sembilan sektor ekonomi dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi basis dan berpotensi dapat dikembangkan menjadi andalan bagi perekonomian Propinsi Lampung selama periode 1993 – 2002 adalah sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan nilai LQ nya sebesar 2.158, sektor konstruksi sebesar 1.225, sektor transportasi sebesar 1.108 dan sektor jasa – jasa dengan nilai LQ sebesar 1.024, jadi secara keseluruhan sektor Basis mempunyai nilai LQ lebih dari satu ( $LQ > 1$ ). Sedangkan yang termasuk sektor ekonomi non basis dengan  $LQ < 1$  yaitu sektor pertambangan, dan galian sebesar 0.229, sektor industri pengolahan sebesar 0.557, sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 0.565, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 0.948 serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 0.693. Kontribusi dari sektor ekonomi basis terhadap PDRB dengan rata – rata sebesar 61.44 ternyata lebih besar dari sektor ekonomi non basis sebesar 38.56, ini berarti sektor basis selain dapat diandalkan dalam kegiatan perekonomian juga merupakan salah satu komponen yang turut serta dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Lampung. Secara keseluruhan melalui upaya pajak diketahui bahwa komponen penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang besar adalah dari pos pajak daerah dan bagi hasil pajak yaitu sebesar 1.004 persen dan 0.24 persen sehingga pada saat PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam membayar pajak pun semakin meningkat, jadi keberhasilan daerah melalui usaha pajak atau tax effort secara tidak langsung dapat mendukung pelaksanaan otonomi Daerah di Propinsi Lampung.

### **Saran**

Menempatkan pelaksanaan orientasi pembangunan berdasarkan potensi dan kondisi daerah setempat dan mengikutsertakan pelaku – pelaku ekonomi yang potensial dan berkualitas yang ada di daerah. Potensi pengembangan sektor pertanian dan agro industri pedesaan di Lampung perlu digali karena memiliki harapan dan potensi untuk dikembangkan, mengingat sumber daya lahan yang tersedia cukup mendukung. Mengintensifkan penagihan, termasuk pembenahan prosedur, sistem, dan pengawasan terhadap sumber penerimaan daerah yaitu pajak dan retribusi. Menekankan peningkatan penerimaan daerah melalui upaya pajak justru lebih efektif daripada tindakan menekankan upaya pajak pada peningkatan kemampuan membayar pajak masyarakat.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Abukosim, Taufiq, **Respon Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang**, Jurnal ekonomi pembangunan edisi III, Palembang, 2004.

- Arsyad, Lincoln, **Ekonomi Pembangunan**, STIE YKPN, Yogyakarta, 1998.
- Bachri, Fahrizal, **Analisis Sektor – Sektor Unggulan Propinsi Sumatera Selatan**, Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan Proyek HEDS, Sumatera Selatan, 2003.
- BPS, **Lampung Dalam Angka**, BPS Propinsi Lampung, Bandar Lampung, 2003.
- Boediono, **Teori pertumbuhan Ekonomi**, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1982.
- Dipenda Prop Lampung, **Penerimaan Daerah Propinsi Lampung**, DIPENDA Propinsi Lampung, 2003.
- Hermawati, **Faktor – faktor yang mempengaruhi Kunjungan Wisatawan Nusanara ke Propinsi Lampung**, Thesis Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2002.
- Irman, **Analisis Potensi Sektoral Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan**, Thesis Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2002.
- Ismail, Zainuddin, **Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Selatan**, Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, 2003.
- Kuncoro, Mudrajat, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Erlangga, FE UGM Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Mangkoesoebroto, Guritno. **Ekonomi Publik**, edisi 3, BPFE UGM, Yogyakarta, 1993.
- Parman, Joni, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah kasus Propinsi Sumatera Selatan**, Thesis Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, 2002.
- Prasentiantono, Tony, **Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia : Substansi Dan Urgensi**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994,
- Sukirno, Sadono, **Pengantar Teori Mikro Ekonomi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sukirno, Sadono, **Pengantar Teori Makro Ekonomi**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Suparmoko, M, **Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Tim Press Release P2E, **Gambaran Perekonomian Indonesia 2004 : Sektor Riil Menunggu Hasil Pemilu**, Jurnal Ekonomi Dan pembangunan, P2E – LIPI, Jakarta, 2003.
- Taufiq, **Potensi Relatof Sektor – sektor Ekonomi Propinsi Sumatera Selatan**, Kajian ekonomi Edisi I, Palembang, 2001.
- Widodo, Susetyo Triyanto, **Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia**, Kansius, Jakarta, 1989.
- Yudithia, **Penentuan Sektor Ekonomi Strategis di Propinsi Lampung**, Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Lampung, 2000.
- Yudhoyono, Bambang, **Otonomi Daerah**, Sinar harapan Jakarta, Jakarta, 2001.